

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA**

**Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Liw  
Studi Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Liw  
Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw**

**Oleh :**

**M. DIMAS ARYA PRATAMA PANGGAR BESI**

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering disebut sebagai sebuah produk hukum yang “tegas, keras, dan humanis”.Tegas dan keras terhadap para pelaku peredaran gelap, namun humanis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Terhadap pelaku peredaran gelap narkotika berlaku ketentuan hukum pidana berat, selain mendapat hukuman fisik (penjara), pelaku dikenakan pula pidana denda, namun dalam kenyataannya jumlah pelaku tindak pidana ini justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak begitu memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Maka penulis tertarik untuk membahas mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim mengenai penjatuhan pidana terhadap perantara jual beli narkotika dengan putusan nomor Dengan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Liw, Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Liw, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw yang menetapkan terdakwa perantara jual beli narkotika di pidana. Dalam ketiga putusan tindak pidana perantara jual beli narkotika tersebut dituliskan bahwa atas ketiga terdakwa dilakukan pemisahan perkara splitsing. Splitsing adalah pemisahan berkas perkara pidana dengan terdakwa yang berbeda dimana suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian. Berdasarkan hal tersebut penulis sangat ingin mengkaji permasalahan ini.

Adapun rumusan masalah penelitian ini: 1) Dalam penyelesaian perkara aquo yang terdiri dari beberapa perkara yang dilakukan pemecahan perkara (*splitsing*)? 2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perantara jual beli narkoba?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan dibandingkan dengan norma-norma atau ketentuan yang berlaku di lapangan. Jenis penelitian hukum empiris atau kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris ini memahami dan mengamati tentang fakta-fakta dalam persidangan melalui wawancara guna mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus dan menetapkan terdakwa perantara jual beli narkoba di pidana. Penelitian hukum ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemidanaan perantara jual beli narkoba.

Kesimpulan Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik. Hak asasi manusia sangat diperhatikan dalam proses peradilan disaat saksi mahkota memberikan keterangan seperti tidak adanya intervensi yang membuat saksi mahkota tertekan. Saran kepada Pemerintah khususnya pembentuk Undang-undang apabila memang saksi mahkota ini merupakan alat yang penting untuk mengungkap sebuah perbuatan hukum maka hendaknya membuat perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang keberadaan Saksi Mahkota. Dalam UU No.3 Tahun 2006 hanya mengatur tentang perlindungan saksi dan korban saja bukan terhadap saksi mahkota.

**Kata kunci: Keterangan saksi mahkota, splitsing, pembuktian, terdakwa, narkoba.**

## ***ABSTRACT***

### **JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGMENTS REGARDING CRIMINAL IMMEDIATEMENT OF NARCOTICS SELLING INTERMEDIATES**

**Study of Decision Number 88/Pid.Sus/2022/PN Liw  
Study of Decision Number 89/Pid.Sus/2022/PN Liw  
Study of Decision Number 90/Pid.Sus/2022/PN Liw**

**By :**

**M. DIMAS ARYA PRATAMA IRON PANGGAR**

In order to create a prosperous Indonesian society, it is necessary to continuously increase efforts in the field of medicine and health services, including the availability of narcotics as medicine, in addition to developing science. Therefore, in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics it is often referred to as a legal product that is "firm, hard, and humane". The provisions of severe criminal law apply to perpetrators of illicit drug trafficking, in addition to receiving corporal punishment (prison), perpetrators are also subject to fines, but in reality the number of perpetrators of this crime is actually increasing. This is due to the fact that the imposition of a sentence does not really have an impact *ordeterrent effect* against the perpetrators. So the author is interested in discussing the juridical analysis of the judge's considerations regarding the imposition of a criminal sentence on the intermediary for selling and buying narcotics with decision number With Decision Number 88/Pid.Sus/2022/PN Liw, Decision Number 89/Pid.Sus/2022/PN Liw, Decision Number 90/Pid.Sus/2022/PN Liw which sets the accused intermediary for buying and selling narcotics as criminal. In the three decisions on the criminal act of intermediary buying and selling of narcotics it was written that the three defendants carried out a splitsing case. Splitsing is the separation of criminal case files with different defendants where a crime is committed jointly by the defendant concerned. Based on this description, the researcher is very interested in examining more deeply the use of crown witnesses as a means of evidence in proving. Based on this, the writer really wants to study this problem. As for the formulation of the research problem: 1) In the settlement of the aquo case which consists of several cases, the case solving is carried out (*split*)? 2) the judge's considerations in imposing criminal sanctions on intermediaries buying and selling narcotics?

**Method** The method used in this research is empirical juridical, which is an approach by investigating matters related to law directly and compared with the norms or provisions that apply in the field. This type of empirical legal research or empirical study is a study that views law as a reality, including social reality, cultural reality, and so on. This empirical legal research understands and observes the facts in the trial through interviews to find out the judge's considerations in deciding and determining the defendant as a criminal intermediary for buying and selling narcotics. This legal research aims to find out the basic considerations of judges in passing decisions on criminal acts of intermediary buying and selling of narcotics.

**Conclusion** By splitting the case file into several independent cases, between one defendant and another, each of them can serve as a witness reciprocally. Meanwhile, if they are combined in one dossier and trial examination, one cannot be used as a reciprocal witness. Human rights are given great attention in the judicial process when the crown witness provides information such as the absence of intervention which puts pressure on the crown witness. Suggestions to the government, especially legislators, if indeed a crown witness is an important tool for uncovering a legal act, then it should make legislation that specifically regulates the whereabouts of a crown witness. Law No. 3 of 2006 only regulates the protection of witnesses and victims, not crown witnesses.

**Keywords:** Crown witness testimony, splitsing, proof, defendant, narcotics.